

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA

Maria Valentina Irma Purwanti
Maria_valentina@yahoo.com
Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the implementation of Good Corporate Governance and its effect on the increase of university competitive advantage. While, the research was descriptive with case-study approach and interview as the instrument. Moreover, there were five aspects of Good Corporate Governance. They were transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. Through data collection technique, there were 5 respondents as sample. Furthermore, the interview used with persons in high position and institute officers of Stikom Surabaya, Institute of Business and Informatics. In line with, some questions within interview related to the topic of understanding and implementation of Good Corporate Governance in University. The research result concluded the implementation of Good Corporate Governance in university had positive and significant effect on the university competitive advantage. Likewise, the university image had positive and significant effect on its competitive advantage. In addition, based on the implementation of Good Corporate Governance in Stikom, the institute was categorized as high criteria with the result of respondents' interview. In general, the implementation of Good Corporate Governance in Stikom Surabaya, Institute of Business and Informatics had been well-implemented.

Keywords: transparency, accountability, responsibility, independency, fairness

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *good corporate governance* serta implikasinya pada peningkatan keunggulan bersaing perguruan tinggi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode studi kasus dan wawancara. Prinsip *good corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan lima aspek yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran. Ukuran sampel dalam penelitian ini sebanyak 5 responden yang diambil dengan teknik wawancara petinggi dan pejabat Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya melalui pertanyaan seputar pemahaman dan pelaksanaan *good corporate governance* dalam perguruan tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penerapan *good corporate governance* yang diterapkan dan dijalankan oleh perguruan tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing perguruan tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Citra berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Penerapan *good corporate governance* pada perguruan tinggi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya masuk kedalam kriteria "Tinggi" dengan melihat hasil wawancara responden. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa penerapan dan pelaksanaan *good corporate governance* pada perguruan tinggi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya sudah dilaksanakan dengan baik.

Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran

PENDAHULUAN

Mengelola perguruan tinggi di Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah, begitu banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi antara lain : bagaimana mendapatkan (calon) mahasiswa yang bermutu dalam jumlah yang cukup, bagaimana menentukan jumlah SPP, bagaimana mendapatkan dosen-dosen yang qualified (bergelar S1, S2, S3) yang harus diberi honor yang kompetitif, bagaimana menyediakan sarana prasarana yang memadai (ruang kuliah, ruang dosen, buku-buku dan jurnal ilmiah), bagaimana menentukan kurikulum berbasis kompetensi sehingga bisa menghasilkan lulusan yang kompeten dan mampu diserap pasar tenaga kerja. Dan bagaimana dalam menghadapi persaingan dari PTN dan PTS baik yang berada di Surabaya maupun yang berada di luar Surabaya.

Perguruan tinggi harus bisa mencari keseimbangan antara kuantitas dengan kualitas. Jika terlalu mementingkan kuantitas berarti akan mengorbankan kualitas dan merugikan lulusan karena akan sulit mencari pekerjaan. Jika terlalu mementingkan kualitas, berarti kuantitas dikorbankan.

Menurut Endri (2006), struktur *governance* di perguruan tinggi relative spesifik dibandingkan dengan jenis perusahaan non-pendidikan, terutama terkait erat dengan peran pihak yayasan sebagai bagian *stakeholder* yang memegang kunci penting dalam pengelolaan PT. struktur *governance* di sebagian besar perguruan tinggi swasta membentuk tripod yang terdiri dari (a) Yayasan Perguruan Tinggi, (b) Rektor Universitas-Institut atau Ketua Sekolah Tinggi atau Dekan Fakultas dan, (c) Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan. Jika mengacu kepada struktur *governance* pada umumnya perusahaan non pendidikan Yayasan perguruan tinggi mewakili pemegang saham, Rektor Universitas-Institut atau Ketua Sekolah Tinggi atau Dekan Fakultas mewakili dewan direksi dan BPH- Yayasan mewakili dewan komisaris.

Sinergi yang terjadi antara Yayasan melalui Badan Pelaksana Harian atau BPH Yayasan sebagai *facilitator* dan *advisor* dan Rektor Universitas-Institut atau Ketua Sekolah Tinggi atau Dekan Fakultas sebagai *leader* dan *negotiator* dalam system penyelenggaraan PTS diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. BPH yayasan dalam pengembangan suatu PTS memainkan peran sebagai *Facilitator* dan *Advisor* perubahan yang berorientasi pada menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya perubahan organisasi serta menjadi konsultan yang memberikan saran bagi pengembangan PTS. Sebaliknya Rektor atau Ketua atau Dekan memainkan peran sebagai *leader* dan *negotiator* perubahan yang berorientasi pada memimpin proses perubahan organisasi dengan mentransformasikan visi organisasi ke dalam tindakan nyata serta menjadi perantara bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan PTS.

Definisi *Good Corporate Governance (GCG)* menurut Bank Dunia adalah Aturan, standart dan organisasi dibidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor. Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan system pengendalian dan keseimbangan untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. *good corporate governance* terdiri dari sekumpulan perangkat hukum yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Menurut Syakhroza (2003) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih focus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Mahasiswa memiliki perspektif yang luas serta jauh ke depan terhadap tata kelola serta pembangunan potensi pemerintahan Institusi baik. Namun supaya dapat mewujudkannya, diperlukan seperti kepekaan akan apa yang dibutuhkan supaya dapat mewujudkan perkembangan tersebut. Langkah utama untuk mengawali suatu perubahan terhadap suatu tatanan Institusi adalah dengan bagaimana pimpinan beserta jajarannya, staf dan mahasiswa yang tergabung dalam sebuah Institusi, begitu pun mahasiswa juga tergabung dalam sebuah organisasi baik itu SEMA dan DEMA maupun UKM serta Komunitas, dan mengupayakan bentuk tata kelola organisasi secara baik dan ideal. Dengan

bagaimana diketahui, di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, dalam bentuk sejarah Institusinya merupakan salah satu bentuk motor pergerakan Sumber daya manusia untuk mewujudkan visi dan misi yang Profesional, unggul dan berkompotensi. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif Sumber daya manusia dan organisasi mahasiswa di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya yang berfikiran kritis serta idealis untuk keinginan dalam menciptakan suatu negara yang adil dan makmur. Melihat perkembangan sekarang ini, organisasi mahasiswa di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dibidang eksekutif yang dijalankan oleh/atau mahasiswa Strata-1 dan Diploma, telah berkembang dengan pesat dalam segi kuantitas yang berjumlah dua puluh Empat organisasi ditingkat fakultas maupun universitas. Akan tetapi, diorganisasi mahasiswa tersebut dalam dan untuk menjalankan tata kelola organisasinya terkadang masih terlihat tidak optimal. Dan sering terjadi yang namanya ketidakjelasan serta kebingungan dalam organisasi mahasiswa di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, untuk mengatur dan mengelola organisasi mahasiswanya dengan baik dan benar. Dapat dilihat masih minim peran aktifnya mahasiswa di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya untuk ikut dan berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola organisasi mahasiswa di kampusnya supaya lebih baik. Dan kemudian, organisasi mahasiswa ini pun sangat minim dalam mempublikasikan anggaran dana yang mereka kelola. Selain itu, masih ada usaha dalam membangun *monoloyalitas* secara sistematis yang dapat mengakibatkan terjadinya dan terciptanya kondisi untuk saling mengawasi (*checks and balances sistem*) antara organisasi kemahasiswaan yang ada di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, sehingga tidak seperti akuntabel. Transparansi, akuntabilitas dan parsipasi yang seharusnya merupakan tugas dasar dalam sebuah organisasi mahasiswa. Ketiga hal itu adalah beberapa sebagai prinsip yang terdapat dalam *good governance* yang mana dalam hal tersebut selama ini sudah diterapkan pada tata kelola di dalam perusahaan (*good corporate governance*) maupun di dalam universitas (*good university governance*). Di kedepannya, dengan ini diterapkan *good governance* sebagai tata kelola diorganisasi mahasiswa, maka dapat terwujud *good student governance*. *Good student governance* itu sendiri dapat diartikan untuk perwujudan di dalam tata kelola pemerintahan yang sudah dikhususkan sebagai organisasi ditingkat Institutsi yang mana akan dijalankan oleh Sumber Daya Manusia itu sendiri. Namun jika, untuk menerapkan hal ini organisasi harus mengetahui kesanggupannya dan dapat mengimplementasi di dalam organisasi mahasiswa yang selama ini terkait transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, karena di dalam hal tersebut merupakan beberapa prinsip dari *good governance*. Apabila dibeberapa prinsip tersebut selama ini tidak diimplementasikan, maka harus mencari factor yang menyebabkannya agar kedepan dapat di terapkannya *good Corporate governance*. Untuk itu perlu dibuat atau kembali dipertegaskan penerapan prinsip *good Corporate governance* di oraganisasi mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Dengan ini, mahasiswa akan dapat belajar sebagaimana dengan menjalankan suatu tatanan pemerintahan yang baik serta kedepanya akan dapat diterapkannya ketika menjadi pemimpin di suatu negeri ini. Dengan kaitanya hal tersebut menjadi sebuah penelitian yang akan mengulas 3 (tiga) rumusan masalah yaitu 1) dapat di lihat pada peran aktif mahasiswa untuk berpartisipasi didalam menjalankan serta mengawasi sebuah organisasi mahasiswa di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 2) sebuah organisasi mahasiswa yang menjalankan prinsip akuntabilitas dan Transparansi serta mengakomodir bagaimana partisipasi mahasiswa serta dalam Faktor Pendukung dan Penghambat. 3) dalam konsepnya *good Corporate governance* yang dapat di lihat baik serta ideal supaya dapat diterapkan dalam organisasi mahasiswa di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.

Guna mencapai sasaran yang telah disusun oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dalam Dokumen Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003-2010 (*Higher Education Long Terms Strategy, HELTS 2003-2010*) yaitu dalam peningkatan daya saing bangsa serta peningkatan kesehatan organisasi penyelenggara pendidikan tinggi

untuk itu perguruan tinggi dapat menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)*. Oleh karena itu, didalam prinsip penerapan *Corporate Governance* pada perguruan tinggi di perlukan keinginan mendesain ulang pola *governance* yang melihatkan seluruh *Stakeholders* di perguruan tinggi. Seorang penulis juga mengusulkan desain *governance* di perguruan tinggi untuk mempertimbangkan sebuah perangkat *governance* yang terdiri dari 1) struktur *governance* perguruan tinggi, 2) mekanisme *governance* perguruan tinggi, 3) prinsip-prinsip *governance* perguruan tinggi, dan system *governance* perguruan tinggi.

Di dalam konsep pendidikan tinggi didunia pada awalnya diperkenalkan dinegara Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Hal Ini adalah sebuah pengakuan terhadap hak yang ada pada rakyat Amerika untuk mudah memperoleh pendidikan tinggi. Didalam konteks Indonesia ini, hal yang sama juga akan berlaku bahwa di dalam segenap warga negara Indonesia harus memiliki hak yang sama didalam mengakses sumber pendidikan tinggi yang ada saat ini. Kesejahteraan bangsa ini dapat terletak dalam kualitas dipendidikannya, hal ini berdasarkan pada kualitas yang ada dalam sumber daya manusia khusus penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya pengetahuan ini, dapat lebih bermanfaat sebagai menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas di dalam lingkungan hidup dan keunggulan yang kompetitif serta komparatif disuatu bangsa. Dalam perguruan tinggi akan menanggung beban sejarah pada pembangunan bangsa melalui relasi dan dapat timbal balik pada sektor swasta, masyarakat serta pemerintah sipil. Tidak adanya pendidikan tinggi yang berumutu, bekelas dunia dan prestisius, pada akhirnya daya saing bangsa tidak bisa meningkat secara signifikan. Dengan demikian, perguruan tinggi sebagai manufaktur dalam pengetahuan (*manufacture of knowledge*) harus senantiasa akan memeriksa posisi sentral pada tengah masyarakat yang berbasis pengetahuan (*knowledge based society*). (Wijatno, 2009) dan selain itu adanya komunitas kaum intelektual yang sangat penting pada perguruan tinggi merupakan, sebagai bentuk perubahan (*agent of change*) untuk mengatasi permasalahan di masyarakat yang ada. Terdapat tiga kewajiban yang dapat dan harus diterapkan pada perguruan tinggi yakni penelitian, pendidikan serta pengabdian masyarakat yang sekarang dapat disebut dengan Tri Darma Perguruan Tinggi merupakan sebagai media dalam mewujudkan bentuk perubahan sosial. Transfer atau konservasi ilmu akan menjadi sebagai peran utama serta menjadi tolak ukur di institusi perguruan tinggi sekaligus diharapkan menjadikan sebagai kelompok intelektual yang akan memegang teguh nilai luhur untuk menjunjung tinggi dalam suatu bangsa. (Eli, 2013). Kelompok intelektual juga harus menjadi filter guna menyesuaikan diri pada lingkungan di luar yang akan mengandung unsur-unsur keburukan dan menyimpang dari adanya aturan yang ada. Dalam konteks di Indonesia, sebagaimana yang ada dinegara berkembang lain, pendidikan tinggi akan dihadapkan pada tiga tantangan yang sangat penting, yaitu: 1) peningkatan relevansi, kualitas, efisiensi, ekuiti serta *governance*, 2) posisi pada pendidikan tinggi ini sebagai kekuatan moral guna membantu untuk mengarahkan demokratisasi pada masyarakat serta reformasi sosial dan politik, 3) adanya tantangan yang baru muncul akibat adanya konstruksi ekonomi pengetahuan, internasionalisasi, serta kompetisi yang ada pada negara akan semakin meningkat (Esha, 2011). Tidak hanya pada sektor privat saja yang menerapkan *corporate governance*, pada sektor pendidikan juga mulai akan mengarahkan sistem tata kelola yang baik serta ideal sehingga dapat disebut dengan prinsip *good university governance*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan pokok permasalahan yang telah diuraikan rumusan masalah yang dikemukakan bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya (Stikom) ?. Sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada Stikom Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Stewardship Theory

Dalam teori penelitian ini berupa teori tata laksana (*stewardship theory*). Teori tersebut memandang manajemen untuk pihak yang dipercaya untuk bertindak dengan sebaiknya untuk kepentingan publik umumnya, maupun shareholders pada khususnya. Teori *stewardship* menerapkan penelitian akuntansi sektor publik dalam suatu organisasi pemerintahan salah satunya di Perguruan Tinggi. Akuntansi di dalam sebuah organisasi sektor publik sudah dipersiapkan guna memenuhi kebutuhan di segala informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi juga sebagai penggerak (*driver*) di dalam berjalannya transaksi – transaksi yang bergerak kearah kompleks dan diikuti dengan pertumbuhan spesialisasi yang ada dalam akuntansi serta perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi yang semakin kompleks ini dengan bertambah tuntutan akuntabilitas pada Perguruan Tinggi yang berada di Indonesia. Dalam teori ini mereka mengasumsikan bahwa hubungan yang kuat diantara kesuksesan pada organisasi kepada kepuasan pemilik. Di dalam teori Steward beliau akan melindungi serta memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan yang ada, sehingga dengan begitu fungsi utilitas akan berjalan secara maksimal. *stewardship* mengasumsikan bahwa manajer dapat meluruskan tujuannya sesuai dengan tujuan pemilik. Dengan demikian bukan berarti steward tidak memiliki kebutuhan hidup. (Raharjo, 2007) Dalam penelitian ini teori *stewardship* menjadi hal penting dalam pencapaian *good univeristy governance*. Pada hakikatnya manusia diharapkan supaya mudah dipercaya, dan mampu bertindak secara dan penuh tanggung jawab, serta dapat memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain. Transparansi dan akuntabilitas disini juga mempunyai peran yang sangat besar guna menunjukkan kepada pihak eksternal seperti pemerintahan dan masyarakat yang mengatakan pengelolaan perguruan tinggi sudah dan telah berjalan dengan baik. Dengan cara mengedepankan kepentingannya beserta komitmen organisasi yang sudah optimal agar tercapai pada tujuan yang telah diharapkan.

Perguruan Tinggi

Di dalam Pengertiannya Perguruan Tinggi yang menuut PP Nomor 60 Tahun 1999, mengatakan sebagai satuan pendidikan yang terdapat wilayah otonom dan mandiri, mereka yang memiliki hak mengelola lembaganya sendiri untuk pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi pada penekanan ilmiah serta pengabdian masyarakatnya. Yang di maksud dengan tujuan pemberian otonomi tersebut ini, akan diberikan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan diri dari para civitas akademiknya, dan berpedoman pada norma yang ada beserta kaidah keilmuannya itu sendiri. Perguruan tinggi berdasarkan Ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 32 Tahun 2009 mengenai mekanisme Pendirian Badan Hukum, beserta Perubahan Badan Hukum Milik Negara, Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah atau masyarakat. Menurut Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan dapat diartikan sebagai pendidikan yang akan dilaksanakan setelah pendidikan menengah, juga mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, serta doktor yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi. Pendidikan tinggi juga menjadi sumber inovasi serta solusi bagi pertumbuhan dan perkembangan jaman bangsa sekarang ini seiring dengan berkembangnya zaman.

Di dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi ini, Tata kelola di dalam perguruan tinggi juga merupakan suatu kondisi untuk menjamin adanya proses kesamaan, kohesi, kesejajaran, dan keseimbangan peran, serta dapat saling mengontrol hal ini dapat dilakukan oleh komponen terkait. Melihat hal tersebut teknisnya tata kelola dapat di nyatakan sebagai upaya sistematis didalam suatu proses guna mencapai tujuan suatu organisasi, juga dapat melalui fungsi perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, serta tindak lanjutnya untuk peningkatan. Tata kelola selain untuk melingkupi seluruh proses beserta unsurnya tersebut,

juga dapat memiliki tujuan utama, seperti pada peningkatan kualitas diperguruan tinggi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dan untuk saat ini sebuah pengelolaan yang ada pada perguruan tinggi terdapat didalamnya beberapa pasal dalam perundangan No 12 Tahun 2012.

Good Corporate Governance

Beberapa Institusi Indonesia mengajukan definisi *corporate governance*, antara lain oleh *Forum For Corporate Governance in Indonesia* yang mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut *The Indonesian Institut for Corporate Governance (ICG,2000)* mengidentifikasikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain.

Komisi nasional *Good Corporate Governance (GCG)* mengidentifikasikan *Good Corporate Governance* sebagai pola hubungan, system, serta proses yang digunakan organ perusahaan (direksi, Komisaris) guna member nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya. Pola hubungan, system, serta proses tersebut berjalan berdasarkan pada lima prinsip yaitu transparansi (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), tanggung jawab (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*).

Sementara menurut Syaroza (2003) mengidentifikasikan GCG sebagai sesuatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif, dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik dapat dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih focus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip di atas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan mengembangkan *transparansi*, kepercayaan dan tanggungjawab serta menetapkan system pengelolaan yang mendorong dan mempromosikan kreatifitas dan kewirausahaan yang *progresif* dalam perguruan tinggi adalah untuk memaksimalkan nilai pengurus perguruan tinggi dan *stakeholder* (dosen, karyawan, mahasiswa, alumni, seta masyarakat luas).

Penerapan *Corporate Governance* yang baik memberikan manfaat sebagai berikut : (a) Kebaikan dalam komunikasi, (b) meminimalisasi potensial benturan, (c) Fokus pada strategi-strategi utama, (d) peningkatan dalam produktifitas dan efisiensi, (e) kesinambungan manfaat (*sustainability of Benefit*), (f) Promosi citra *corporate (Coporat image)*, (g) Peningkatan kepuasan pelanggan, (h) perolehan kepercayaan investor.

Penerapan pada nilai *Good Corporate Governance* di dalam Perguruan Tinggi juga dapat diinternalisasi menjadi budaya pada perguruan tinggi, sehingga akan menjadi sebuah system yang memperkuat *competitive advantage*. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance* yang sering digunakan adalah menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* meliputi; 1) *transparency* (transparansi), merupakan keterbukaan baik dalam prosedur, mekanisme dan praktek serta hasil pengawasan yang di lakukan. Hal ini terkait erat dengan

system komunikasi dan pelaporan yang menjamin pengungkapan (*disclosure*) implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perguruan tinggi dan kinerja perguruan tinggi, serta informasi-informasi penting lainnya kepada *stakeholders* dan *stakeholders* secara memadai, akurat dan tepat waktu. *Transparansi* dalam penilaian kinerja pegawai, penilaian kompetensi pegawai dengan menggunakan kompetensi *assessment*, melalui *assessment* penilaian dilakukan secara langsung, yang melibatkan pegawai yang bersangkutan, atasan langsung, rekan kerja serta dokumen nilai kinerja individu. *Assessment center* juga dimanfaatkan untuk mengetahui potensi pada diri seorang pegawai didalam hal penempatan jabatan serta promosi. Perguruan tinggi juga mengembangkan sarana komunikasi antara manajemen dan karyawan melalui media sosial yang diharapkan dan dapat dimanfaatkan untuk sarana memberikan masukan demi kemajuan lembaga, 2) *accountability* (akuntabilitas), mempunyai pengertian bahwa perguruan tinggi menguraikan peran dan tanggung jawab setiap Rektor, Dekan, Dosen, Karyawan, serta Mahasiswa dengan jelas, beserta ukuran pencapaiannya. Prinsip ini terkait erat dengan proses pengukuran kinerja, pengawasan, dan pelaporan. Aspek akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan, Rektor bertanggung jawabkan laporan keuangan tahunan lembaga yang telah disetujui dan melakukan evaluasi performansi keuangan triwulanan dan tahunan. Aspek yang ada pada akuntabilitas dalam sumber daya manusia, akan berkaitan dengan upah untuk meningkatkan kinerja SD, diterapkan pada system reward dan *Punishment* kepada karyawan yang dapat dikaitkan dengan kebijakan kompensasi yang berlaku, 3) *responsibility* (responsibilitas). Setiap individu dalam perguruan tinggi harus bertanggung jawab atas segala tindakannya, terutama yang berkenaan dengan peranan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Prinsip ini erat kaitannya dengan manajemen risiko-risiko yang dihadapi oleh perguruan tinggi dengan tujuan untuk melindungi bahkan meningkatkan nilai / kepentingan *stakeholder* dan pemegang saham, 4) *independency*. Dosen, Karyawan, serta Mahasiswa sebagai *stakeholders* dalam melaksanakan peran dan tanggungjawabnya harus bebas dari segala bentuk benturan kepentingan yang berpotensi untuk muncul. Hali ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak lain, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan itu dibuat semata-mata demi kepentingan perguruan tinggi. Sedangkan pada penerapan kemandirian di bidang Sumber Daya Manusia dapat dilakukan sebagai penunjukan pejabat di tingkat tertentu, serta kandidat yang akan terpilih ditentukan melalui Job Tender dan pemilihan berdasarkan hasil nilai kinerja individu, 5) *fairness* (kewajaran). *Fairness* dapat diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap atau perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemegang saham ataupun *stakeholders* yang terkait (*Equitable treatment*) dalam hal ini Dosen, Karyawan dan Mahasiswa sebagai *stakeholders* dalam perguruan tinggi. Menjaga hubungan terhadap sesama karyawan agar menghindari praktek diskriminasi dan menghormati hak asasi pada karyawan dengan memberikan kesempatan yang sama dengan tidak membedakan umur, ras, suku, agama serta jenis kelamin sebagai sumber daya yang sangat berharga.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif *deskriptif* adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai studi kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003:1).

Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bilamana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang

kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya kalau hanya ditunjukkan sekedar untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu di pelajari secara intensif dan mendalam. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang di teliti, tetapi, juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain data dalam studi kasus dapat di peroleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan di teliti. (Nawawi, 2003:2)

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, dalam penelitian ini menggunakan data Primer yang di peroleh dari hasil wawancara. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya oleh penulis. Dalam hal ini, data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu pimpinan universitas. Wawancara di laksanakan secara semi terstruktur dengan panduan materi wawancara yang di persiapkan terlebih dahulu. Materi Wawancara menggunakan Prinsip *good corporate governance* meliputi : *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency dan fairness* (kewajaran).

Satuan Kajian

Transparansi

Transparansi ini dapat dibangun atas dasar dari segala informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga, serta informasi perlu diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang sudah tersedia harus memadai supaya dapat dimengerti dan dapat dipantau lebih jelas. Transparansi memiliki tiga sub kriteria yaitu; 1) melakukan sosialisasi tentang bagaimana rencana strategis yang telah atau sudah dikembangkan oleh civitas akademik., 2) memberitahukan secara langsung atau terbuka dibidang keuangan, sistem dan prosedur pada penerimaan mahasiswa barunya, sistem pelaporan, sistem akuntansi, rekrutmen karyawan dan dosen serta pemilihan pejabat structural, 3) kebijakan pada perguruan tinggi akan mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kepada pihak intern maupun ekstern perguruan tinggi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban kepada pihak yang diberi mandat guna memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas memiliki tiga sub criteria yaitu; 1) universitas dimana sumber daya manusia bekerja memiliki uraian, tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap pejabat struktural, anggota senat fakultas atau akademis, dosen dan karyawan yang selaras dengan visi, misi, dan rencana strategis, 2) pada sistem pengendalian intern ini akan dilakukan secara efektif serta efisien didalam pengelolaan perguruan tinggi, 3) mengukur kinerja untuk bertujuan mengevaluasi serta mengendalikan segala aktivitas organisasi akan dicapai dengan cara yang efisien dan efektif.

Responsibilitas

Responsibilitas ini juga merupakan sebuah kemampuan di dalam suatu organisasi guna mengatur sejauh mana terlihat dalam pemberian layanan yang sudah atau telah berjalan sesuai dengan aturan berlaku atau prosedur yang sudah atau telah di atur. Responsibilitas memiliki dua sub kriteria yaitu; 1) patuh terhadap peraturan undang - undang yang berlaku tentang segala penyelenggaraan perguruan tinggi, 2) patuh terhadap segala peraturan undang -undang yang sudah dibuat, 3) melaksanakan tanggung jawab

kepada masyarakat serta lingkungan sehingga dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Independensi

Keadaan dimana organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Independensi memiliki sub criteria yaitu; 1) mengambil suatu keputusan pada perguruan tinggi ini juga perlu terpisah dari yang namanya pemerintahan yang memilikinya, sehingga akan terbebas dari benturan kepentingan yang ada didalamnya, 2) harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, 3) melaksanakan tugas serta fungsinya diperguruan tinggi harus bebas dari segala pengaruh serta tekanan yang akan bersifat intern dan ekstern.

Keadilan

Kewajaran atau *fairness* adalah keadilan kepada stakeholders, supaya setiap stakeholders dapat terlindungi dari penyelewengan, yang ada baik didalam bentuk usaha guna kepentingan pribadi ataupun benturan kepada kepentingan atau praktik pada perguruan tinggi yang sudah tidak sehat. Kewajaran memiliki tiga sub kriteria yaitu; 1) perlakuan ini setara dengan pihak yang harus berkepentingan sesuai dengan manfaat yang ada dan dapat kontribusi untuk diberikan kepada perguruan tinggi, 2) akan diberikannya kesempatan yang sama untuk penerimaan mahasiswa, karyawan, untuk berkarir serta melaksanakan tugas secara profesional dengan tidak ada tindakan diskriminasi, 3) penerapan serta pemberian reward dan punishment di berikan kepada kesemua pihak dengan tidak ada tindakan diskriminasi.

Teknik Analisis Data

Metode untuk menganalisis data masukan adalah metode kualitatif. Mengnai hal-hal yang berhubungan dengan penilaian dosen, karyawan, serta mahasiswa mengenai penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*, pada Stikom Surabaya. Riset kualitatif ini sulit dikuantifisir, maka untuk menjamin validasi dan reliabilitas hasil penelitian di gunakan skala *kuesioner elicited verbal attitude*, yaitu jawaban verbal responden atas suatu daftar pertanyaan yang mengukur sikapnya sebagai indikator dari kelakuan verbal dan nonverbal.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Transparansi

Transparansi yang dilakukan guna menunjang dan tercapainya visi dan misi stikom Surabaya, Dalam hal ini Stikom Surabaya menunjukkan bahwa dalam prinsip transparansi ini sudah terlaksana dalam hal keterbukaan penilaian kinerja pegawai, penilaian kompetensi pegawai dengan menggunakan kompetensi assessment, melalui assessment penilaian dilakukan secara langsung yang melibatkan pegawai yang bersangkutan, atasan langsung, serta dokumen kinerja individu. Stikom Surabaya juga memberikan Informasi yang akurat dan tepat waktu apabila ada informasi yang patut di ketahui oleh anggota Civitas. Aturan-aturan yang mengenai GCG dapat di sosialisasikan atau di tingkatkan kepada stakeholder agar semua aturan dapat di patuhi oleh anggota Stikom Surabaya, Stikom Surabaya juga mempunyai akses komunikasi antara pihak dalam dan pihak luar. Informasi yang juga disampaikan kepada mahasiswa secara terbuka.

Bambang Hariadi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni Stikom Surabaya mengatakan bahwa:“ Menurut saya stikom Surabaya sudah menerapkan Prinsip Good Corporate Governance, di awal berdiri pimpinan yayasan, mengadakan rapat digawe nentukan statuta, visi, misi sama tujuan di dirikan stikom Surabaya, supaya pimpinan,

karyawan, dan mahasiswa stikom punya pegangan dalam bekerja, dan belajar menentukan tujuan”

Pernyataan tersebut diatas menjelaskan bahwa prinsip transparansi sudah di jalankan untuk pelaksanaan Aktivitas dalam Institusi, Pimpinan memakai pegangan Statuta dan peraturan lainnya untuk berkarya, sehingga Visi, misi serta Tujuan dapat di realisasikan di semua Anggota Civitas Stikom Surabaya. Diawal berdirinya Stikom Surabaya akan diadakannya Forum penyatu Visi melalui Rapat Senat atau Rapat Pimpinan, dan juga mengadakan rapat dengan Yayasan dan Universitas, jika perlu akan di adakan Koordinasi dengan Fakultas yang ada. Autonomy spirit filosofinya adalah pembagian kerja atau kewenangan serta dorongan untuk menumbuhkan inisiatif local atau prakarsa setempat kampus. Community empowering spirit (spirit pemberdayaan masyarakat kampus) pada hakekatnya merupakan proses atau upaya untuk memampukan dan memberikan akses masyarakat dalam segala aspek pembangunan Perguruan tinggi, sehingga masyarakat kampus merasa terlibat, baik secara fisik maupun emosional, berkontribusi dan diberikan tanggung jawab nyata sesuai kemampuannya serta se-mangat kerja dari seluruh jajaran. kualitas kinerja lembaga pendidikan dan prinsip-prinsip dasar good governance dari suatu lembaga pendidikan berbanding lurus dan sekaligus saling pengaruh mempengaruhi satu dengan yang lain.

Oktaviani Kepala Bagian Sumber daya dan Kepegawaian Stikom Surabaya mengatakan bahwa :“ Stikom Surabaya sudah menerapkan, sehingga saya dan karyawan yang lain sudah bekerja menurut pedoman dan etika kerja yang sudah di terapkan, jadi disini juga ada hukum yang berlaku bagi karyawan yang agak keras dengan pendiriannya dalam artian tidak mengikuti aturan atau sak karepe dewe yaa... ada aturan itu dibuat supaya visi, misi stikom dapat terwujud dengan baik”

Pernyataan tersebut diatas menjelaskan bahwa Transparansi di terapkan dalam Stikom Surabaya, kami bekerja di Stikom Surabaya dengan Berpedoman pada Renstra dan adanya Etika Kerja sebagai penilaian kinerja dari Stakeholder (Dosen dan Karyawan), juga adanya Hukum yang berlaku untuk melindungi kepentingan Stakeholder. Sehingga Visi, Misi, dan Tujuan dapat terwujud.

Mohammad Al Hafidz Kepala Bagian Kemahasiswaan Stikom Surabaya mengatakan bahwa : “ Penerapan GCG di stikom sudah Nampak, visi, misi sudah hampir tercapai, sehingga pengendalian manaemen di organisasi stikom sudah bagus, segala informasi yang di lontarkan maupun di tulis semua anggota stikom baik karyawan maupun mahasiswa segera mengetahuinya yang akurat, jadi civitas stikom juga mempunyai hak akses dengan media luar dan dalam untuk segala informasi yang akurat, kegiatan sosial juga sudah dijalankan oleh dosen dan mahasiswa kami di stikom Surabaya”

Pernyataan tersebut diatas Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas sudah hampir tercapai, adanya Pengendalian Manajemen dan Organisasi baik di Civitas maupun di organisasi Mahasiswa, Stikom Surabaya juga memberikan Informasi yang akurat dan tepat waktu apabila ada informasi yang patut di ketahui oleh anggota Civitas. Aturan-aturan yang mengenai GCG dapat di sosialisasikan atau di tingkatkan kepada stakeholder agar semua aturan dapat di patuhi oleh anggota Stikom Surabaya, Stikom Surabaya juga mempunyai akses komunikasi antara pihak dalam dan pihak luar. Kegiatan sosial yang kita jalani biasa dilakukan dengan cara Pengabdian Kepada Masyarakat.

Akuntabilitas

Dalam prinsip akuntabilitas Stikom Surabaya mempunyai peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh setiap pemegang jabatan, seperti halnya Rektor mempunyai peran dalam menyiapkan pemimpin yang akan datang, Rektor Stikom Surabaya adalah pemimpin utama yang bertanggung jawab kepada yayasan, secara umum rektor mempunyai tugas memimpin kebijakan dan pendidikan serta membina tenaga kependidikan, Mahasiswa dan

tenaga administrasi, Wakil Rektor I (Bidang Akademik) Mempunyai peran dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat serta program kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Wakil Rektor II (Bidang Sumber daya) Mempunyai peran dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, Administrasi Umum dan manajemen Sumber daya. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) mempunyai peran dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan, pengembangan, dan pelayanan mahasiswa. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mempunyai peran dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan Administrasi fakultas. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor. Kelompok dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada atasan masing - masing di lingkungan fakultas yang bersangkutan. Kelompok pengajar terdiri dari tenaga pengajar tetap dan tenaga pengajar luar biasa. Karyawan Mempunyai peran dalam menyukseskan perguruan tinggi dalam hal membantu proses belajar mengajar serta administrasi. Mahasiswa mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas, mutu stikom Surabaya dengan menjalakan misi, visi dan tujuan. Dalam hal di atas dapat di ukur tingkat pencapaiannya jika, kualitas dan mutu sudah sesuai yang di harapkan oleh stikom Surabaya.

Aspek akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan, Rektor mempertanggung jawabkan laporan keuangan tahunan lembaga yang telah di setujui dan melakukan evaluasi keuangan triwulan dan tahunan, berkaitan dengan upah SDM dilakukan kenaikan setiap tahunnya, reward dan punishment biasa dilakukan dan di berikan setiap tahunnya sesuai dengan masa kerja karyawan tersebut hal itu dilandasi dengan aturan dan kesesuaian yang telah disetujui dari pimpinan dan yayasan.

Yuvita Kepala Bagian Keuangan Stikom Surabaya mengatakan bahwa: “ di stikom sudah menerapkan prinsip GCG di bagian keuangan, laporan ada setiap tahunnya, bagian keuangan juga diaudit secara internal maupun eksternal oleh yayasan, jadi kita harus teliti dan tepat dalam menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar, kalau tidak akan menjadi masalah nantinya, jadi kalau menurut ku itu sudah termasuk dalam prinsip GCG” Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Stikom Surabaya sudah menerapkan Prinsip Akuntabilitas sehingga dengan adanya Prinsip tersebut Laporan Keuangan Stikom Surabaya di laporkan tiap Tahunan, dan audit untuk sector keuangan di lakukan melalui audit Internal dan Eksternal Oleh Pihak Yayasan, ketelitian dan ketepatan waktu untuk menyikapi keuangan selalu terjadi.

Oktaviani Kepala Bagian Sumber daya dan Kepegawaian Stikom Surabaya mengatakan bahwa :“ Pemberian Reward dan Punishment yang di lakukan, seperti biasa setiap bulan jika ada jadwal rapat rutin, kami akan memberikan reward sesuai dengan masa kerja karyawan tersebut, gak hanya reward biasa nya juga cuti diberikan setiap 5 tahunan, yang boleh diambil 1 bulan” Pernyataan tersebut diatas menjelaskan bahwa Stikom Surabaya sudah menerapkan Prinsip Akuntabilitas sehingga dengan adanya Prinsip tersebut Reward yang di kuskan untuk karyawan stikom Surabaya telah di berikan dengan ketentuan yang sudah di atur sesuai dengan kebijakan.

Responsibilitas

Responsibilitas dalam Stikom Surabaya merupakan suatu kemampuan dalam suatu organisasi untuk mengatur suatu pemberian layanan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan pada prosedur yang sudah di atur di stikom surabaya. Dalam segala bentuk layanan seperti halnya saling melayani kebutuhan antar karyawan atau dosen kepada mahasiswa. Kepatuhan kepada peraturan undang - undang yang sudah berlaku tentang penyelenggaraan pada universitas sudah di lakukan juga oleh civitas Stikom. Pada pelaksanaan tanggung jawab kepada masyarakat serta lingkungan, sehingga akan dapat

terpelihara kesinambungan usaha pada jangka panjang. Pelayanan untuk di berikan oleh stikom surabaya kepada masyarakat maupun kepada pihak internal, seperti hal nya kami memberi layanan kepada para karyawan dan mahasiswa sudah sesuai prosedur yang di terapkan oleh stikom surabaya. Kepada penerimaan mahasiswa baru pun kami juga sudah menerapkan prinsip GCG, sehingga kami di bagian penerimaan mahasiswa baru juga memberika pelayanan yang membuat sumber daya manusia merasa saling di hargai.

Independency

Di dalam prinsip Independency seluruh civitas stikom surabaya, seperti dosen, karyawan serta mahasiswa sebagai stakeholder dalam melakukan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak manapun baik yang bersifat intern dan ekstern. Sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat memberikan ide dan wawasan sesuai visi dan misi yang ada.

Fairness (Kewajaran)

Prinsip Kewajaran di Stikom Surabaya mempunyai perlakuan yang sama terhadap perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemegang saham ataupun Stakeholder, dalam hal ini Dosen, Karyawan dan Mahasiswa sebagai Stakeholder dalam perguruan tinggi. Untuk menghindari praktek diskriminasi dan menghormati hak asasi karyawan dengan cara menjaga hubungan terhadap sesama karyawan dengan memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan umur, suku, ras, agama dan jenis kelamin. Stikom surabaya menjalin kekeluargaan, yang erat tanpa membeda-bedakan, sehingga dapat terciptanya kedamaian dan kenyamanan dalam bekerja dan menjalin komunikasi antar pimpinan, karyawan dan mahasiswa.

Rinaldi Siwi Ketua Senat Mahasiswa Stikom Surabaya mengatakan bahwa : “ jika berbicara tentang Prinsip GCG sendiri, sebenarnya Stikom Surabaya sudah melakukan, di dalam stikom seluruh anggota civitas sangat menjaga baik hubungan antar karyawan, mahasiswa, dosen atau pun pimpinan, mereka tidak membedakan satu sama lainnya, saling menghormati dan menghargai, dan peran aktif mahasiswa seperti SEMA dan DEMA dalam menerapkan GCG, sehingga, stikom surabaya dapat maju dan berkembang ” Pernyataan tersebut menjelaskan Setiap Orang selalu menjaga nama baik Stikom, dengan cara saling menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa membedakan agama, suku dan jabatan, sehingga salah satu prinsip GCG dapat terealisasikan. Kesempatan ini di berikan secara sama pada hal penerimaan mahasiswa, karyawan, serta berkarir untuk melaksanakan tugasnya secara dan dengan profesional dengan tidak ada diskriminasi.

Penjelasan

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya memperoleh Hasil yang baik. Artinya Stikom Surabaya telah melakukan penerapan *good corporate governance* dengan baik. Stikom Surabaya mampu menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) karena didukung oleh beberapa hal antara lain; 1) Adanya pedoman inti yang dipegang teguh oleh pimpinan yaitu STATUTA beserta peraturan-peraturan dibawahnya. Pedoman yang mengatur mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing pimpinan serta hak dan kewajiban dari stakeholders-nya. Selain itu STATUTA mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi dalam hal ini adalah Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, 2) visi misi tujuan serta nilai-nilai Institut yang telah terinternalisasikan di antara anggota Civitas. Sehingga bila terjadi perbedaan pandangan akan dapat disatukan dengan mengingat pada visi misi serta nilai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang hendak dicapai, 3) adanya internal rules dan lingkungan hukum yang melindungi kepentingan stakeholders-nya (dosen,karyawan serta mahasiswa Stikom Surabaya), 4) adanya Etika

Strategi dan Etika Kerja. Etika Strategi dalam hal ini adalah Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop) dan etika kerja, yang mengarah pada *Good Corporate Governance* (GCG). Etika kerja disini adalah penilaian kinerja dari stakeholders, dalam hal ini yang di maksud dosen, karyawan dan mahasiswa, 5) Kuatnya governance dalam sector keuangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya audit internal yang berasal dari yayasan dan audit eksternal yang ditunjuk oleh yayasan namun audit eksternal ini bersifat insidental, yang hanya dipakai bila diperlukan saja, 6) memiliki system pengendalian internal yang kompeten dibidangnya masing-masing. Pengendalian internal ini meliputi; pengendalian manajemen, pengendalian kode etik serta pengendalian manajemen dan organisasinya, 7) memiliki forum-forum sebagai penyatuan visi Forum tertinggi dalam Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya adalah Rapat Senat. Biasanya hal-hal yang dibicarakan dalam forum ini yang berkaitan dengan aktivitas akademik. Selain rapat Senat ada pula rapat pimpinan, rapat yayasan dengan universitas, serta rapat koordinasi dengan fakultas. Bila berkaitan dengan teknis atau menyangkut kebijakan unit maka diputuskan melalui rapat pimpinan intitusi, 8) dalam menerapkan *good corporate governance*, Stikom Surabaya melakukannya dengan didasari sikap untuk berperilaku adil terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*-nya), memberikan informasi tentang setiap kejadian penting dengan akurat dan tepat waktu (*transparency*), mengatur wewenang, tugas dan tanggung jawab Rektor, Dekan dan pejabat organisasi agar profesional (*accountability*), dan patuh pada semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*responsibility*), serta berpegang pada acuan-acuan (*guidelines*) yang merupakan perangkat hukum (*legalaspect*), dan *corevalue* universitas., 9) memiliki akses komunikasi berkaitan dengan prinsip *transparency* (transparansi) Informasi mengenai Stikom Surabaya yang dapat diakses oleh semua orang, tidak hanya terbatas pada orang-orang yang mempunyai kedudukan, dan *stakeholders* Stikom Surabaya, masyarakat umum juga dapat mengaksesnya melalui website Stikom Surabaya. Selain melalui website dapat pula berinteraksi dengan rektorat melalui email, informasi juga diperoleh melalui Stikom News. Untuk informasi secara resmi bisa melalui unit-unit, dalam bentuk surat penerangan unit, 10) adanya laporan tahunan dalam laporan tahunan ini terdapat mengenai laporan keuangan aktivitas kegiatan secara rutin yang telah dilaksanakan, perkembangan-perkembangan yang dialami oleh Stikom Surabaya, Hal-hal yang telah dicapai dan sasaran berikutnya yang ingin dicapai, dan lain-lain, 11) memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui pengabdian pada masyarakat, melakukan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, mandiri, dan profesional.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis deskripsi yang telah dilakukan, maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; 1) Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya telah melakukan penerapan atas *good corporate governance* dengan perolehan Hasil Wawancara tersebut. Artinya penerapan *good corporate governance* yang telah dilakukan oleh Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya sudah baik. Namun perlu lebih ditingkatkan lagi dalam aspek praktek *corporate governance*-nya, 2) pelaksanaan *good university governance* di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya sudah terlaksana dengan baik hal tersebut dilihat dengan transparansi yang dilakukan oleh Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Prinsip transparansi telah dilaksanakan dan di lakukan dengan baik karena perguruan tinggi sudah menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan, dan selalu menyediakan laporan keuangan serta laporan manajemen secara berkala sehingga dapat diketahui bahwa Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya telah melakukan transparansi terhadap hal-hal yang dianggap material untuk disampaikan

kepada stakeholders, 3) independensi di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya telah dilaksanakan dengan sangat baik karena adanya penetapan setiap fungsi dalam perguruan tinggi yang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku terlihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, 4) tanggungjawab di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya sudah berjalan baik karena pengelolaan di Perguruan Tinggi sudah sesuai dengan bisnis yang ada saat ini, secara konsisten mengelola Perguruan Tinggi dengan baik untuk meningkatkan citra untuk tetap bertahan dalam kegiatannya. Pertanggungjawaban di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya tidak hanya pada peraturan dan undang-undang yang berlaku tetapi juga masyarakat yang ada di sekitar. Seiring dengan efektifitas internal audit di perguruan tinggi yang sudah baik, maka pelaksanaan *good corporate governance* di perguruan tinggi dapat terwujud dengan baik.

Saran

Beberapa saran untuk Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya bila akan meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance*, melalui pendekatan dan pengembangan berikut ini; 1) dimulai dengan keyakinan yang kuat (*strong belief*) akan manfaat dari penerapan *good corporate governance* (gcg) atau tata kelola perusahaan yang baik, yang selanjutnya menjadi *good university governance* (gug) atau tata kelola perguruan tinggi yang baik, 2) dari keyakinan yang kuat tersebut, kemudian akan timbul semangat (*attitude*) untuk menerapkan prinsip-prinsip penerapan tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan standart yang ada, 3) institusi dalam aktivitasnya, sehari-hari wajib mematuhi (*compliance*) acuan-acuan, baik yang dibuat sendiri, maupun yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbatasan

Berdasarkan dengan kesimpulan terdapat pada kutipan, maka adanya keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) responden yang ada dalam penelitian tersebut belum sampai dalam jumlah yang dapat diharapkan oleh peneliti, karena disebabkan oleh keterbatasan waktu, 2) hasil Penelitian pada Institusi ini bervariasi, sehingga penelitian ini belum dilakukan homogeny, 3) keterbatasan Lingkup penelitian pada Institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Endri. (2006). Best Practice Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Sinergi dan Kinerja Stakeholders. Dosen FE-USAKTI/STEKPI
- Eli, S. (2013). Good University Governance: Prinsip dan Implementasi Dalam Penggalan Pendapatan. Malang: Gunung Samudra.
- Esha, M. I. (2011). Pemikiran Mwujudkan Good University Governance di Perguruan Tinggi Islam. El-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN, (50), 91-101.
- Nawawi, (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Komptitif, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewrship dalam Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi, 2(1), 37-46.
- Syarozza, A, (2003). Mekanisme Pengendalian Internal dalam Melakukan Assesmen terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance, Majalah Usahawan Indonesia, No.08, Vol XXXI, pp 41-52
- Wijatno, S. (2009). Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif dan Ekonomis. Jakarta: Salemba Empat.